

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Kini pemerintah mulai gencar melakukan pengembangan potensi desa. Walaupun saat ini di Indonesia sedang adanya Covid-19 namun pemerintah tetap berusaha mengembangkan potensi desa dengan terus menyelenggarakan sosialisasi ke desa – desa untuk membuat atau mendirikan BUMDes. Pendirian BUMDes ini sangat diperlukan untuk membangun desa karena banyak unit usaha yang bisa dilakukan dengan adanya BUMDes. Oleh karena itu pemerintah terus berusaha agar semua desa dapat mendirikan BUMDes. BUM Desa secara mendasar ialah lembaga yang dibentuk oleh Desa atau bisa disebut juga lembaga dibawah naungan desa. Faktor finansial desa, mengenai tentang tujuan didirikannya BUM Desa untuk menaikkan PADesa dengan menyerahkan tugas atau wewenang desa untuk melaksanakan upaya desa yang bertujuan agar perekonomian di desa semakin maju dan berkembang. Jika PADesa dapat meningkat, maka APB Desa juga akan semakin tinggi, oleh karena itu pada saatnya pemerintah desa pasti akan semakin mandiri dalam menyelenggarakan pembangunan desanya.

Namun selain penjelasan tersebut, perlu diingat pula bahwa kemampuan BUM Desa selain secara ekonomi juga memiliki kemampuan sosial. Kemampuan moneter, dimana fungsi ekonomi dapat terlihat dalam kegiatan-kegiatan pengembangan dan pengelolaan BUMDesa. BUMDesa sendiri merupakan organisasi desa yang harus memberikan pendapatan bersih ke desa dan untuk

wilayah desa. Selain kemampuan finansial, ada juga kemampuan sosial. Kemampuan sosial yang dapat dipenuhi oleh BUM Desa adalah: (1) implikasinya, yaitu dengan memberikan devisa kepada simpanan kota melalui perluasan PADesa yang kemudian akan digunakan untuk latihan peningkatan kota dengan metodologi biasa untuk kemajuan kota dewan; dan (2) Secara langsung, dan itu berarti memberikan arahan dan bantuan kepada organisasi yang dilakukan oleh jaringan kota, serta mengawasi barang/administrasi publik. Properti normal yang masuk akal atau dilakukan oleh BUM Desa yaitu: pasar desa, hutan desa, air bersih, pariwisata desa, simpan pinjam, dan yang lainnya. Jadi dari penjelasan diatas, maka tersimpulkan warga pedesaan bisa mengungkapkan pemanfaatan ideal barang umum yang dikuasai desa.

Salah satu unit khusus yang diselesaikan oleh BUMDes adalah unit khusus administrasi moneter (Lembaga Keuangan Mikro). Tindakan mendasar dalam unit khusus ini adalah melakukan latihan, misalnya, yang dilakukan oleh bank salah satunya merupakan kegiatan simpan pinjam, dimana dalam melakukan kegiatan ini diikuti juga dengan kegiatan mengalihkan kredit usaha independen untuk membantu individu dan daerah yang membutuhkan dana untuk menjalankan usaha mereka. Pinjaman ini sangat menolong anggota atau masyarakat yang membutuhkan dana untuk melakukan usaha. Pinjaman modal yang diberikan untuk program kredit ini diselesaikan satu kali setiap tahun. Pengaturan kredit yang diberikan oleh BUMDes juga tidak dapat dibedakan dari adanya kewajiban yang tidak terpenuhi yang dibuat oleh peminjam, atau bahkan ada peminjam yang sama sekali tidak membayar pinjaman yang dilaksanakan. Hal ini dapat terjadi karena kekecewaan peminjam untuk memenuhi komitmennya untuk membayar

cicilan dari pokok kredit bersama untuk bunga yang tuan rumah telah diselesaikan oleh dua pertemuan dalam perjanjian kredit.

Dalam usaha kegiatan simpan pinjam, masalah yang paling penting dan sering terjadi dan juga sangat berpengaruh terhadap kegiatan operasi suatu organisasi atau lembaga adalah tentang pengembalian atas kredit atau bisa dikatakan kredit tidak lancar. Kredit bermasalah ialah dimana suatu situasi peminjam yang tidak bisa melakukan pembayaran atau cicilan. Hal ini dapat terjadi dikarenakan banyak faktor, misalnya adalah peminjam tidak memiliki dana, mengalami pailit, tingkat suku bunga dan faktor yang lainnya. Namun selain faktor dari peminjam, kita sebagai pemberi pinjaman juga memiliki peran penting dalam hal menangani kredit macet atau mencegah kredit macet. Peran penting tersebut adalah pihak peminjam harus memiliki pengendalian internal yang baik selain itu juga pihak peminjam sangat memerlukan peran auditor untuk melakukan pemeriksaan terkait kredit macet agar bisa cepat teratasi untuk mencegah terjadinya pailit.

Dikutip dari (Bali Express, 2021) Kadis PMD Buleleng yaitu Nyoman Agus Jaya Sumpena mengatakan bahwa kehadiran BUMDes di Kabupaten Buleleng dapat menjadi pemicu pendorong utama perekonomian di masa-masa sulit moneter seperti sekarang ini. Selain itu, BUMDes tidak hanya berpartisipasi dalam dana cadangan dan uang muka, ada juga air papan, sampah dan toko. Dengan demikian, dapat membuat perekonomian di kota tercipta. “Tugas BUMDes dalam menggerakkan perekonomian itu nyata. Secara garis besar sangat berpengaruh terhadap *town pay*. BUMDes yang bisa dijadikan gambaran adalah BUMDes Desa Panji yang saat ini perekonomian di sana sangat luas. Keuntungan

kelompok, lanjutnya, saat ini sudah terbentuk 124 BUMDes dari 129 kota di Buleleng. Dari 129 BUMDes tersebut, 5 BUMDes di antaranya berstatus terbaik, namun ke atas 64 BUMDes berstatus berdiri, 15 BUMD kurang berkembang dan 24 BUMDes bermaalah. BUMDes Bermasalah berbagai persoalan yang muncul di BUMDes disebabkan oleh kredit macet.

Berlandaskan RPJM Kabupaten Buleleng (2018-2022) ada 9 Kecamatan didalamnya termasuk Kecamatan Seririt. Kecamatan ini terdiri atas 20 Desa, dan sudah terbentuk 20 BUMDes. Berikut data BUMDes Se-Kecamatan Seririt Tahun 2022

**Tabel 1**  
**Data BUMDes Se-Kecamatan Seririt**

No	Nama Desa	Nama BUMDes	Tahun Berdiri	Jenis Usaha	Kondisi BUMDes
1	Unggahan	Carang Sari	2017	- Simpan Pinjam - PAM Desa - Unit Toko	Sedang Berkembang
2	Munduk Bestala	Wira Kusuma	2012	- Simpan Pinjam - Toko	Kurang Berkembang
3	Bestala	Lumbang Taman Sari	2017	- PAM Desa - Pasar Desa - Jasa Online	Berkembang
4	Mayong	Mandiri Bersama "GSM"	2012	- Toko Yadnya - Air Bersih - Simpan Pinjam (Macet)	Bermasalah
5	Rangdu	Sri Kandi Sadu Mandara	2014	- Simpan Pinjam - Toko	Berkembang
6	Ularan	Jagad Ditha	2012	- Simpan Pinjam - Penyewaan Alat Suka Duka	Berkembang
7	Ringdikit	Giri Artha Mandara	2014	- Simpan Pinjam - Toserba	Berkembang
8	Joanyar	Dana	2014	- Simpan Pinjam - Usaha Dagang	Kurang

		Sanggraha			Berkembang
9	Kalianget	Mandiri	2014	- Simpan Pinjam - ATK - Foto Copy - Air Kemasan	Berkembang
10	Tangguwisia	BUMDESA Tangguwisia	2014	- Simpan Pinjam - Pasar Desa - Pengelolaan Sampah - Restribusi/Parkir	Berkembang
11	Sulanyah	Bina Usaha Sure Mandara	2012	- Simpan Pinjam - Toserba - Rental Mobil	Berkembang
12	Pengastulan	Artha Werdi Sarana	2012	- Simpan Pinjam - Usaha Dagang	Kurang Berkembang
13	Patemon	Patemon Mandara	2013	- Simpan Pinjam - Pertokoan - Jasa	Kurang Berkembang
14	Lokapaksa	Loka Mandara	2013	- Simpan Pinjam - Pasar Desa - Air Bersih	Bermasalah
15	Umeanyar	Rahayu Mesari	2018	- Unit Usaha Dagang	Baru Berdiri
16	Banjar Asem	Banjar Asem Mandara	2012	- Simpan Pinjam - Toserba	Kurang Berkembang
17	Kalisada	BUMDESA Kalisada Mandara	2014	- Simpan Pinjam	Kurang Berkembang
18	Pangkungparuk	BUMDESA Artha Nadi	2012	- Simpan Pinjam - UPS Air Bersih	Berkembang
19	Bubunan	Artha Wiguna Hita Gosa	2019		Baru Berdiri
20	Gunung Sari	Giri Sedana	2020		Baru Berdiri

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng

Data tersebut kita bisa mengetahui kondisi BUMDes Se-Kecamatan Seririt, dimana dari 20 BUMDes terdapat 7 BUMDes yang berkembang, 6 BUMDes yang kurang berkembang, 1 BUMDes yang sedang berkembang, 3

BUMDes yang baru berdiri, dan 2 BUMDes yang bermasalah. Permasalahan utama dalam BUMDes ini adalah karena kredit macet sehingga menyebabkan salah satu BUMDes berhenti beroperasi. Selain BUMDes yang bermasalah BUMDes yang berkembang juga memiliki permasalahan kredit macet dalam usaha simpan pinjam.

Selain data dari Dinas Perbedayaan Masyarakat dan Desa, disini penulis juga telah memperoleh data dari Ibu Komang Sri Krisnawati, selaku Bendahara BUMDes Mandiri Bersama Desa Mayong bahwa usaha simpan pinjam bumdes mayong dimulai dari tahun 2012 namun telah terjadi kredit macet dari tahun 2016 dan saya mendapatkan data bahwa pada tahun 2021 sebanyak 193 nasabah yang mengalami kredit macet dengan total Rp 224.277.000. Dan data dari Ibu Komang Diah Ayu Suarmini, selaku bendahara BUMDes Bina Usaha Sure Mandara Desa Sulanyah menunjukkan bahwa pada tahun 2021 sebanyak 83 nasabah yang mengalami kredit macet dengan total Rp 728.265.470 dan kredit lancar dengan total 347.925.030. Data dari Bapak I Gusti Bagus Bayudana, selaku ketua BUMDes Loka Mandara Desa Lokapaksa terdapat 326 nasabah dengan total kredit macet 516.236.393 dan total kredit lancarnya adalah 73.600.000. Pada saat ini untuk pengawasan Bumdes, PMD tidak melakukan ini. Bagaimanapun, pihaknya akan memberikan arahan dengan asumsi ada BUMDes yang bermasalah. Misalnya, memberdayakan BUMDes untuk mengatasi masalah yang terjadi.

Berlandaskan hasil wawancara dengan Ibu Komang Sri Krisnawati sebagai bendahara BUMDes Mandiri Bersama Desa Mayong, Ibu Komang Diah Ayu Suarmini selaku bendahara BUMDes Bina Usaha Sure Mandara Desa

Sulanyah, Ibu Made Widanti, dan Ibu Kadek Budi Astini selaku ketua unit simpan pinjam dan bendahara BUMDes Wira Kusuma Desa Munduk Bestala, dan bapak Ketut Adi Ariawan selaku Ketua BUMDes Mandiri Desa Kalianget, disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh audit internal tidak dilakukan setiap bulan. Pengawasan dilakukan hanya pada saat ada rapat – rapat tertentu saja. Sedangkan untuk pembagian tugas kepada masing – masing pegawai BUMDes belum terlaksana dengan ideal, hal ini terjadi karena ada perangkapan tugas, contohnya adalah bendahara merangkap sebagai sekretaris, pegawai toko merangkap sebagai kasir, bendahara merangkap sebagai kasir, dan yang lainnya.

*Grand Theory* yang dipergunakan pada riset ini ialah teori agensi. Hipotesis organisasi masuk akal dari hubungan antara setidaknya satu individu yang menjadi kepala (pemilik modal) dan eksekutif sebagai spesialis (direktur modal) (Jensen dan Meekling, 1976). Eksekutif adalah pihak yang diciutkan oleh pemilik modal yang kemudian disetujui untuk kepentingan investor. Dengan demikian, pemerintah diharapkan untuk mewakili setiap pekerjaannya kepada pemilik modal. Selain itu, Jensen dan Meekling (1976) menonjolkan pelepasan kemampuan kepemilikan utama dari kemampuan administrasi sebagai spesialis. Seperti yang diungkapkan oleh Eisenhard (1989), hipotesis kantor bergantung pada tiga kecurigaan, secara spesifik:

- 1) Pengandaian tentang insting manusia memaknai bahwa manusia memiliki alam pikiran yang sempit (keadaan pribadi), dan dapat melakukannya tanpa adanya kesempatan.
- 2) Anggapan-anggapan tentang pergaulan itu memaknai pertikaian antar individu dalam pergaulan.

- 3) Anggapan tentang data yang masuk akal bahwa ada AI (*Asymmetric Information*) antara kepala dan spesialis.

Teori agensi pada riset ini dipertimbangkan bisa memperjelas pengurus BUMDes (*principal*) disaat mengelola BUMDes akan mengesampingkan keunggulan mereka sendiri dan meningkatkan presentasi mereka untuk mencapai tujuan BUMDes. Sebaliknya, dalam hal pemberian kredit, klien (masyarakat desa) sebagai tenaga ahli yang selama ini diandalkan oleh pengurus (pimpinan) BUMDes untuk mengawasi sebagian dari subsidi BUMDes akan berusaha secara jujur untuk mengembalikan aset yang diberikan.

Berlandaskan hasil pengamatan yang dilaksanakan melalui wawancara kepada bapak I Gede Suartama dengan jabatan Kabid Pemerintah Desa DPMD maka didapatkan hasil bahwa kenyataan dilapangan berbeda dengan teori yang ada. Seperti sistem audit yang ada di bumdes itu semua sudah ada pengawasnya. Dia yang mengawasi semua pekerjaan yang ada di BUMDes. Namun permasalahan utama dalam audit internal sendiri ada pada kemampuan pada sumber daya manusianya. Hal ini terjadi karena masing – masing desa sendiri yang boleh menunjuk audit yang independen. Selain itu tugas audit internal juga tidak baku, karena tidak ada kewajiban atau peraturan yang baku dari pusat. Oleh karena itu bisa saja audit internal melakukan pengawasan yang salah terhadap usaha simpan pinjam yang ada di BUMDes sehingga terjadi kredit macet , dan belum dapat menemukan jalan keluar dari permasalahan kredit macet tersebut.

Peran auditor internal sangat diperlukan dalam menangani permasalahan sejenis ini. Auditor dalam akan menolong dalam melihat masalah utama dalam kejadian kredit macet, ini juga akan memberikan solusi

bagi kekurangan atau kelemahan dari kegiatan tersebut. Solusi yang diberikan pastinya berupa perbaikan yang akan sangat membantu mengurangi permasalahan nasabah, dalam hal ini kredit macet. Menurut Agoes (2018) audit internal (audit internal) ialah kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh bagian audit internal entitas, pada laporan keuangan serta catatan akuntansi perusahaan atau ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan kepatuhan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan profesional ikatan yang ada. Karena tidak adanya audit eksternal yang melakukan audit keuangan di BUMDes secara berkala, bisa saja dilakukan audit dari pihak eksternal tetapi atas dasar BUMDes ataupun pihak yang terkait dengan BUMDes. Sehingga audit yang dilakukan dari pihak internal BUMDes bisa saja tidak sesuai dengan catatan aslinya dengan kata lain bisa saja dimanipulasi. Sehingga ini akan berpengaruh terhadap kesehatan keuangan BUMDes, yang nantinya berimbas pada masalah kredit macet. Ketika tinjauan internal dapat berjalan dengan baik dan dapat mengetahui penyebab kredit buruk, administrasi atau kepala akan mengambil keputusan agar kredit buruk atau uang muka penerbitan dapat dibatasi. Hasil riset oleh Kanza (2016), Harefa dan Bustari (2020) menemukan tinjauan internal berdampak buruk pada pencegahan kredit buruk. Hasil ini tidak sama dengan riset Raditya (2013) dan Fadhillah (2019) yang menemukan terdapat dampak positif antara *inside review* pada peminjaman.

Namun jika kita lihat sekarang dari segi suku bunga berlandaskan hasil pengamatan yang terlaksana melalui wawancara kepada bapak I Gede Suartama dengan jabatan Kabid Pemerintah Desa DPMD maka didapatkan hasil bahwa kenyataan dilapangan berbeda dengan teori yang ada. Bahwa tingkat suku bunga

yang ada di BUMDes itu diatur oleh bumdes dan tidak ada ketentuan dari pusat. Di bumdes lewat ADART yang dibuat pada saat musdes tertuang dalam ADARTnya. Karena sumber dari modalnya BUMDes adalah dari APBDes. APBDes ini ada namanya pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pembiayaan inilah yang akan nanti menjadi modal. Pembiayaan itu artinya kalau uang itu dikeluarkan, maka akan diterima kembali senilai yang dikeluarkan. Kalau dia akan ditaruh dibumdes sebagai investasi, maka nanti akan dikembalikan dalam jangka panjang senilai itu. Berarti dia tidak menuntut harus seberapa pengembaliannya yang penting dihitung sesuai dengan analisa. Berapa analisa daripada pendapatan. Kalau bunganya misalnya bank anggap 1,5 maka bumdes bisa dibawah itu yg penting membantu masyarakat kecil. Tingkat suku bunga bumdes tidak ditentukan dari pusat tetapi ditentukan dari masing masing desa lewat musdes yang tertuang dalam ADART yang terpenting tidak merugikan masyarakat kecil. Namun disini masih ada saja bumdes yg memiliki tingkat suku bunga yang tinggi karena itu sudah sesuai dengan musdes. Seperti desa sulanyah dengan tingkat suku bunga 2,5. Oleh karena itu BUMDes Desa Sulanyah memiliki kredit macet yang tinggi.

Kasmir (2004) mengemukakan biaya pinjaman kredit adalah premi yang diteruskan kepada peminjam atau biaya yang dibayarkan dengan membawa klien ke bank. Besar kecilnya nilai bunga semuanya bergantung pada seberapa banyak aset yang disimpan. Individu atau individu yang mendapatkan uang tunai dari bank atau yayasan lain harus membayar jumlah tertentu dari jumlah kredit utama. Biaya pinjaman kredit adalah masalah biaya yang diberikan kepada pemegang hutang dalam mendapatkan uang tunai. Oleh karena itu, dengan asumsi bahwa

bunga yang dikenakan sangat tinggi, pengembalian pinjaman akan merepotkan. Ini merupakan masalah yang sering terjadi pada BUMDes. Masalah ini akan mengakibatkan tidak sehatnya keuangan BUMDes yang akan berimbas pada masalah kredit macet. Berlandaskan riset Firmani (2008), Ahimsa (2000), Widodo (2003), Gustifa (2012) menemukan suku bunga berdampak positif kepada kredit macet. Sedangkan riset Crysti (2009) menemukan suku bunga berdampak negatif kepada kredit macet.

Selain peran audit internal, dan suku bunga, sistem pengendalian internal juga berperan vital pada operasi suatu entitas. Sistem pengendalian intern mempunyai kekurangan yaitu sistem pengendalian intern bisa memberikan pengaruh terhadap kualitas kredit yang disalurkan, yang dimaksudkan disini adalah ketika entitas menjalankan sistem pengendalian intern secara ideal dan benar, bisa meminimalisir pinjaman macet atau yang mengalami masalah (Hery, 2013). Pengendalian internal akan memberikan pengaruh terhadap aktivitas yang dijalankan di BUMDes. Pengendalian ini penting dilakukan guna mencapai tujuan dari BUMDes. Masalah akan terjadi ketika sistem pengendalian yang diterapkan tidak sesuai ditambah lagi dengan hubungan antar personal yang kurang baik, maka sistem pengendalian ini tidak akan bisa berjalan dengan baik. Yang juga sering terjadi pada BUMDes adalah hubungan antar personalnya kurang baik, yang akan mempengaruhi kinerja dan berimbas pada efektivitas BUMDes. Ketika efektivitas BUMDes kurang baik ini akan menambah masalah atau berimbas pada pengelolaan kredit dan bisa saja akan berpengaruh terhadap kredit macet.

Namun dari hasil pengamatan yang dilaksanakan untuk pengendalian internal melalui wawancara kepada bapak I Gede Suartama dengan jabatan Kabid

Pemerintah Desa DPMD maka didapatkan hasil bahwa kenyataan dilapangan berbeda dengan teori yang ada yaitu diperlukan mendapatkan perhatian juga SDMnya. SDM di desa itu berbeda dengan sumber daya manusia ditingkat kabupaten. Kalau didesa itu pasti kemauan dan kemampuan itu sangat berbeda. Ada yang mau tapi dia tidak tau bagaimana mengelola bumdes. ada yang tau tapi tidak mau mengelola bumdes. Oleh karena itu pengendalian internal pada BUMDes belum bisa dilakukan secara maksimal hal inilah yang menyebabkan pula terjadinya kredit macet. Riset Dewi (2016) serta Arum, dkk (2020) menemukan ada dampak negatif diantara efektivitas SPI kepada kredit bermasalah. Hasil tersebut tidak sama dengan riset Haninun (2011), Sari serta Trisnadewi (2018) yang menemukan ada dampak positif diantara pengendalian intern dan kredit bermasalah

Oleh karena itu pada pemberian kredit, BUMDes harus berpegang pada standar kehati-hatian. Kesalahan dalam memberikan kredit akan memberikan pertaruhan besar. Perjudian adalah sebagai pertaruhan piutang tak tertagih dan penundaan penerimaan piutang dari jadwal, sehingga akan menimbulkan beberapa masalah dalam kredit atau kredit buruk. Unsur 5c sangat penting untuk diperhatikan sebelum memberikan suatu kredit, 5c tersebut berupa *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, dan *conditions*. Ketika kredit macet tinggi BUMDes akan mengalami kesulitan likuiditas jika setiap kali terjadi penarikan dalam jumlah besar sehingga tidak terjadi masalah.

Mengenai apa yang membedakan pemeriksaan ini dari pemeriksaan sebelumnya, antara lain, pertama dan terutama memanfaatkan daerah eksplorasi alternatif dari eksplorasi masa lalu, pemeriksaan masa lalu yang melibatkan

tempat di Bank, Koperasi, dan LPD, sedangkan pada penelitian ini menggunakan BUMDes yang melakukan unit usaha simpan pinjam. LPD Desa Pakraman merupakan yayasan moneter yang bersifat istimewa dan luar biasa, yang menjadi fokus (sui generis) di antara organisasi moneter komparatif lainnya, baik mengenai landasan pengembangan, visi, misi, dan struktur kelembagaannya, maupun tujuannya. juga tidak sama dengan pengertian BUMDes yang berlandaskan Undang – Undang Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021. Perbedaan tersebut yaitu:

- 1) LPD diklaim oleh Desa Pakraman, sedangkan BUMDes dipunyai kota serta saling mengawasi. Kota yang dimaksud adalah kota manajerial yang tidak sama dengan kota pakraman di Bali. Desa Pakraman di Bali mengalami keterpurukan dari zaman ke zaman dalam ikatan Kahyangan Tiga yang menganut agama Hindu Bali;
- 2) Modal LPD terdiri dari setoran desa pakraman, bantuan pemerintah, pendapatan yang dimiliki, dan berbagai sumber yang tidak membatasi. modal BUMDes berasal dari kota sebesar 51% dan dari daerah melalui penyertaan modal sebesar 41%;
- 3) Operasionalisasi LPD menggarisbawahi nalar Tri Hita Karana (hubungan persahabatan yang layak antara Tuhan, manusia, dan iklim), sedangkan operasionalisasi BUMDes menggunakan nalar bisnis yang dibangun dalam budaya sekitar;

- 4) Bidang usaha yang dilakukan oleh LPD dan BUMDes harus dipastikan dengan melihat kemampuan iklim daerah setempat, namun LPD dibatasi oleh pilihan Peraturan Desa Pakraman dan awig;
- 5) LPD memberikan 60% keuntungannya untuk administrasi permodalan dan 40% untuk memenuhi kewajiban dan komitmen kota pakraman (fisik/sekala dan non fisik/niskala). Manfaat yang diperoleh BUMDes diharapkan adanya bantuan pemerintah perorangan (anggota modal) dan daerah melalui strategi desa.

Kedua penelitian sebelumnya ada yang membahas kredit macet BUMDesa namun mempergunakan teknik kualitatif, sedangkan dalam riset ini mempergunakan teknik kuantitatif. Alasan riset ini mempergunakan teknik kuantitatif karena riset ini bertujuan menghubungkan antar variabel pada suatu populasi, dikarenakan hal tersebut saya berkeinginan untuk dapatkan informasi yang tepat sesuai kenyataan saat ini di lapangan yang dapat diukur. Ketiga berlandaskan landasan permasalahan diatas ada masalah tentang kredit macet pada BUMDes di Kecamatan Seririt yang diakibatkan karena kurangnya pengawasan oleh audit internal, suku bunga, dan pengendalian internal yang dijalankan kurang baik. Juga, ada penyimpangan dari efek samping dari satu ulasan ke ulasan lainnya, sehingga penulis tertarik untuk menyelidiki terkait “Pengaruh Audit Internal, Suku Bunga, dan Pengendalian Internal Terhadap Kredit Macet (Studi Kasus Bumdes Se-Kecamatan Seririt).

## 1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Dilihat dari landasan permasalahan yang telah digambarkan, maka dapat dibedakan beberapa permasalahan yang terjadi di BUMDes Kecamatan Seririt sebagai berikut:

1. Terjadinya kredit macet pada BUMDes Se-Kecamatan Seririt.
2. Ada beberapa aspek yang dapat mempengaruhi kejadian kredit macet.
3. Lemahnya audit internal dalam pengawasan pemberian kredit sehingga terjadi kredit macet.
4. Suku bunga yang tinggi sehingga menyebabkan nasabah tidak bisa melunasi pinjamannya dan terjadi kredit macet.
5. Pengendalian internal yang belum optimal sehingga menyebabkan terjadinya kredit macet.

## 1.3 Pembatasan Masalah Penelitian

Pembatasan masalah dilaksanakan agar jangkauan eksplorasi tidak terlalu luas dan lebih berpusat pada pembicaraan tentang hal-hal yang mempengaruhi terjadinya kredit macet sehingga nantinya tidak menyimpang dari topik yang sedang dibahas dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Mengingat dasar dan bukti yang dapat dikenali dari masalah diatas, eksplorasi ini berpusat pada dampak audit internal, suku bunga, dan pengendalian internal pada kredit macet.

#### 1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berlandaskan penguraian sebelumnya, adapun rumusan masalah pada riset ini yakni:

1. Bagaimana audit internal berpengaruh terhadap kredit macet?
2. Bagaimana suku bunga berpengaruh terhadap kredit macet?
3. Bagaimana pengendalian internal berpengaruh terhadap kredit macet?

#### 1.5 Tujuan Penelitian

Berlandaskan latar belakang penelitian serta perumusan masalah yang ada maka tujuan riset ini adalah untuk menguji tentang hal – hal berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh audit internal terhadap kredit macet.
2. Untuk menganalisis pengaruh suku bunga terhadap kredit macet.
3. Untuk menganalisis pengaruh pengendalian internal terhadap kredit macet.

#### 1.6 Manfaat Penelitian

Hasil riset ini diharapkan bisa memberikan manfaat baik teoritis serta praktis yaitu:

1. Manfaat teoritis

Hasil dari riset ini diharapkan bisa menambah dan memperdalam ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi mengenai pengaruh audit internal, suku bunga, serta pengendalian internal pada kredit macet

2. Manfaat praktis
  - a. Bagi BUMDes

Hasil riset ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangan bagi upaya pencegahan kredit macet dengan membendung penyebab-penyebab buruknya kemajuan BUMDes, serta dapat digunakan sebagai data tambahan hipotetis dan pemahaman dampak audit internal, suku bunga, serta pengendalian internal pada kredit macet.

b. Bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Hasil riset ini diharapkan bisa dipergunakan sebagai masukan kepada DPMD untuk memberikan sosialisasi kepada pihak BUMDes terkait permasalahan kredit macet.

c. Bagi Peneliti

Hasil riset ini diharapkan menjadi solusi untuk masalah yang perlu Anda waspadai dan ubah menjadi informasi tambahan, sehingga dapat memperluas wawasan khususnya mengenai audit internal, suku bunga, pengendalian internal, dan kredit macet.

d. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Hasil riset ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi perpustakaan yang dapat dimanfaatkan bagi individu yang membutuhkannya. Eksplorasi ini juga dapat dipergunakan sebagai sumber perspektif untuk pemeriksaan tambahan, khususnya penelitian tentang dampak audit internal, suku bunga, pengendalian internal, terhadap kredit macet.